



Laporan Bulan Desember

2018

Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Meliputi Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum serta Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul
Telp/faks. 0274-367348
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id
Situs: www.pn-bantul.go.id

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Pendahuluan	1
Pelaksanaan tugas	2
A. Kegiatan Administrasi Umum	
1. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	2
2. Bagian Umum dan Keuangan	4
3. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	7
B. Kegiatan Administrasi Teknis	
1. Penyelesaian Perkara	9
2. Data Perkara	13
3. Pelayanan Hukum	17
4. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	17
Progres dan Pencapaian	19
A. Perkara 3 bulan terakhir	19
B. Pelayanan	22
C. Sarana dan Prasarana	22
D. Tata Laksana Organisasi	22
E. Realisasi Anggaran	22
F. Kegiatan Perencanaan dan Anggaran	22
G. Kegiatan Perencanaan dan Anggaran	22
Kesimpulan dan Saran	23

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini adalah uraian kegiatan pada Pengadilan Negeri Bantul secara umum yang disampaikan secara ringkas. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga dapat diketahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bulan selanjutnya.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang sekretariat terdiri dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan IT dan pelaporan. Serta pelaksanaan kegiatan bidang kepaniteraan, diantaranya adalah bagian perdata, bagian pidana dan bagian pelayanan hukum.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan hingga pada bulan Desember ini bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan kegiatan secara lancar dengan berbagai peningkatan baik pada penanganan perkara, administrasi perkara, pelayanan masyarakat, kegiatan pelaksanaan DIPA maupun kegiatan kebersamaan seperti kerja bakti untuk kebersihan dan kerapihan kantor. Atas pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul, kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai harapan dan kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan bersama-sama.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk periode berikutnya.

Bab I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Bantul dengan tingkatan kelas I B sejak tahun 2017. Kantor Pengadilan Negeri Bantul terletak di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul dan berada tidak jauh dengan kompleks kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kepolisian Resor Bantul dan Kantor DPRD Kabupaten Bantul.

Laporan ini dibuat berdasarkan perkembangan yang terjadi pada masing masing bidang kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam periode setiap satu bulan. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan bulanan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Negeri Bantul. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga Pengadilan Negeri Bantul sendiri dapat mengetahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci masing-masing bidang telah kami laporkan sendiri-sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lembaga Peradilan.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang administrasi umum yang meliputi pelaporan di bagian sekretariat yang terdiri dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan TI dan pelaporan. Selanjutnya adalah laporan kegiatan bidang teknis yang menyajikan data-data pada bagian kepaniteraan, diantaranya adalah bagian perdata, bagian pidana dan bagian pelayanan hukum.

Bab II

PELAKSANAAN TUGAS

Pada bab ini disampaikan rincian pelaksanaan tugas dan fungsi yang berjalan pada Pengadilan Negeri Bantul, diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kegiatan administrasi teknis. Pengadministrasian umum meliputi bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Sedangkan administrasi teknis terdiri atas kegiatan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum.

A. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM

1 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Beberapa hal yang dapat disampaikan dari bagian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Statistik kepegawaian pada Pengadilan Negeri Bantul pada bulan Desember adalah:

- 1) Jumlah pegawai pada akhir bulan Desember sebanyak 55 orang.
- 2) Apabila diperinci berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:
 - 1) Golongan IV : 5 Orang
 - 2) Golongan III : 48 Orang
 - 3) Golongan II : 1 Orang
 - 4) Golongan I : 1 Orang
- 3) Mutasi jabatan Struktural : - Orang
- 4) Mutasi jabatan Fungsional : - Orang
- 5) Mutasi dari dalam keluar : - Orang
- 6) Mutasi dari luar ke dalam : - Orang
- 7) Mutasi dari calon pegawai negeri ke pegawai negeri : - Orang
- 8) Mutasi karena pensiun : - Orang
- 9) Mutasi dari pegawai honor ke CPNS : - Orang
- 10) Kenaikan Gaji berkala : - Orang
- 11) Kenaikan Pangkat : - Orang
- 12) Permohonan kartu pegawai telah selesai : - Orang
- 13) Permohonan kartu suami/istri telah selesai : - Orang
- 14) Permohonan satya lencana karya : - Orang
- 15) Jumlah pegawai yang terkena hukuman disiplin : - Orang
- 16) Meninggal dunia : - Orang
- 17) Diklat / Tugas/ Dinas Luar
 - 1) Golongan IV : 3 Orang
 - 2) Golongan III : 3 Orang
 - 3) Golongan II : - Orang

- 4) Golongan I : - Orang
- 18) Prediksi
- 1) Kenaikan Pangkat November : 3 Orang
- 2) Kenaikan Gaji Berkala Bulan November : - Orang
- 3) Pensiun : - Orang
- b. Pengorganisasian Pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:
- 1) Hakim : 10 Orang
- 2) Panitera : 1 Orang
- 3) Sekretaris (merangkap KPA) : 1 Orang
- 4) Panitera Muda : 3 Orang
- 5) Panitera Pengganti : 19 Orang
- 6) Juru Sita : 2 Orang
- 7) Juru Sita Pengganti : 3 Orang
- 8) Kasubag : 3 Orang
- 9) Staf : 13 Orang
- 10) Pejabat Pembuat Komitmen : 1 Orang
- 11) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) : 1 Orang
- 12) Pejabat Penandatanganan SPM : 1 Orang
- 13) Bendahara Penerimaan : 1 Orang
- 14) Bendahara Pengeluaran : 1 Orang
- 15) Arsiparis : - Orang
- 16) Pustakawan : - Orang
- 17) Pranata komputer : - Orang
- 18) Pegawai fungsional yang diperbantukan : 15 Orang
- c. Tata laksana Kepegawaian
- Tata laksana kepegawaian adalah bagaimana pegawai dalam sistem ini bekerja. Salah satunya adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bagaimana setiap bidang dalam sistem ini berjalan.

No	Jenis SOP	Ada/tidak ada	Jumlah
1.	SOP bidang Keperdataan	Ada	15
2.	SOP bidang Kepidanaan	Ada	15
3.	SOP Pelayanan Hukum	Ada	8
4.	SOP Layanan Informasi & pengaduan	Ada	2
5.	SOP tata persuratan	Ada	2
6.	SOP keperpustakaan	Ada	1
7.	SOP Tata laksana keuangan	Ada	9
8.	SOP Umum/tata laksana perkantoran	Ada	2
9.	SOP Pemeliharaan dan tata laksana Aset	Ada	5
10.	SOP tata laksana kepegawaian	Ada	9
11.	SOP tata laksana penganggaran	Ada	3
12.	SOP Teknologi Informasi	Ada	17
13.	SOP Pelaporan	Ada	3

Selain itu sebagai wujud kontrol atas sistem yang dijalankan di perlukan adanya Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mengatur lebih lanjut tata kerja yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI. Berikut adalah SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bantul selama bulan Desember 2018:

- SK Nomor 15 Tahun 2018 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul;
- SK Nomor 16 Tahun 2018 tentang Mentor peserta Diklat Pim Peserta tingkat III.

2 Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Berikut adalah pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan bagian umum dan keuangan pada bulan Desember 2018:

a. Pengelolaan Keuangan

❖ DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400172/2018 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 6.213.405.000 (*enam milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah*). Dari dana tersebut digunakan untuk program Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi (Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi hingga bulan Desember ini adalah sebesar 100,41%. berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 01 yang terjadi pada bulan Desember :

a) Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosentase
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	38.736.000	900.000	19.108.400	49,33%
Layanan Perkantoran	5.997.669.000	458.397.423	6.046.085.137	100,81%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	177.000.000	8.940.000	173.742.270	98,16%
Total	6.213.405.000	468.237.423	6.238.936.407	100,41%

b)Penerimaan Negara

1)	Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	:	Rp.	1.671.300
2)	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	:	Rp.	0

❖ DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.03.2.400173/2018 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 139.640.000 (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*). Dari dana tersebut digunakan untuk program/kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri atas output Pos Bantuan Hukum; Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu; dan Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Peradilan Umum hingga bulan Desember ini adalah sebesar 92,78%. berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 03 yang terjadi pada bulan November:

1) Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosentase
Pos Bantuan Hukum	31.200.000	9.800.000	29.900.000	95,83%
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	108.440.000	18.150.700	99.654.800	91,90%
Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	-	-	-
Total	139.640.000	27.950.700	129.554.800	92,78%

2) Penerimaan Negara

1)	Pendapatan Surat Pengesahan Dibawah Tangan	:	Rp.	5.000
2)	Pendapatan Uang Meja (Leges)	:	Rp.	168.000
3)	Pendapatan Ongkos Perkara	:	Rp.	1.230.000
4)	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	:	Rp.	2.108.900
Total Penerimaan Negara			Rp.	3.511.900

b. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan persediaan

Selama bulan Desember tidak terdapat transaksi BMN pada Badan Urusan Administrasi.

Terdapat revaluasi mengenai revaluasi BMN dari KPKNL Yogyakarta. Hasil revaluasi tersebut dilakukan upload ulang ke aplikasi SIMAN terhadap form pendataan revaluasi BMN berupa tanah dan bangunan dimana pada Pengadilan Negeri Bantul masih menggunakan form yang lama. Per 31 Desember 2018 sudah diganti menggunakan form yang baru.

Nilai aset BMN pada neraca Badan Urusan Administrasi per 31 Desember adalah:

Akun Neraca	Mutasi dari Bulan sebelumnya (Rp)	Nilai (Rp)
Barang Konsumsi	(2.196.175)	9.536.910
Bahan Untuk Pemeliharaan	(1.117.600)	850,400
Tanah	0	11.109.426.000
Peralatan dan Mesin	(8.940.000)	2.509.178.479
Gedung dan Bangunan	0	5.663.510.000
Jalan dan Jembatan	0	36.460.000
Aset Tetap Lainnya	0	48.152.062
KDP	0	0
Software	0	74.570.000
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional	0	58.921.000
Akumulasi penyusutan	0	(2.730.270.170)
Jumlah	(12.253.775)	16.780.334.681

Nilai aset BMN pada neraca Badan Peradilan Umum per 31 Desember adalah:

Akun Neraca	Mutasi dari Bulan sebelumnya (Rp)	Nilai
Barang Konsumsi	(774.800)	4.327.110
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	25.300
Akumulasi penyusutan		(0)
Jumlah	(774.800)	4.352.410

c. Tata Persuratan

a.	Jumlah surat masuk	:	264	Surat
b.	Jumlah surat keluar	:	391	Surat
c.	Jumlah surat masuk sampai dengan bulan Desember	:	2.441	Surat
d.	Jumlah surat keluar sampai dengan bulan Desember	:	3.195	Surat

3 Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kegiatan perencanaan, terutama perencanaan dalam hal anggaran tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan telah satu kali pada setiap periode satu Tahun Anggaran. Dalam proses perencanaan dilakukan beberapa penelaahan berkaitan dengan sinkronisasi anggaran antara Dipa satuan kerja dengan Dipa pusat. Dan dalam pelaksanaan Dipa sangat dimungkinkan adanya atau diperlukan adanya revisi terhadap DIPA maka sub bagian ini bertugas menyiapkan dokumen untuk revisi tersebut.

Selanjutnya, untuk kegiatan TI bertugas melakukan maintenance kelancaran jaringan komputer baik jaringan lokal maupun pengelolaan jaringan internet untuk keperluan kegiatan komunikasi data instansi. Memastikan bahwa komunikasi data dalam jaringan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan pengelolaan website meliputi upload berita dan memegang control panel website. Kegiatan pelaporan meliputi pelaporan bulanan, laporan tahunan, SAKIP serta pelaporan lain yang berhubungan dengan penganggaran dan teknologi informasi.

a. Perencanaan

Rincian DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2018 adalah:

1) DIPA-005.01.2.400172/2018

Program/Kegiatan/Output	Alokasi DIPA (Rp.)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung [005.01.01]	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi [1066]	
Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [1066.001]	38.736.000
Layanan Perkantoran [1066.994]	5.997.669.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung [005.01.02]	
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung [1071]	
Layanan Internal [1071.951]	177.000.000
Total	6.213.405.000

Rencana penarikan dana yang ditargetkan untuk bulan Desember adalah Rp. 583.879.000 (*lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

2) DIPA-005.03.2.400173/2018

Program/Kegiatan/Output	Alokasi DIPA (Rp.)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum [005.03.07]	
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum [1049]	
Layanan Pos Bantuan Hukum [1049.003]	31.200.000

Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu [1049.005]	108.440.000
Total	139.640.000

Rencana penarikan dana yang ditargetkan untuk bulan Desember adalah Rp. 19.894.000 (*sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Revisi DIPA yang dilakukan selama bulan Desember adalah:

- 1) Tidak ada revisi

b. Teknologi Informasi

- 1) Alamat Website Pengadilan Negeri Bantul adalah www.pn-bantul.go.id dan tampilan website sudah disesuaikan dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.
- 2) Alamat e-mail untuk komunikasi data adalah surat@pn-bantul.go.id dan pn_bantul@yahoo.co.id
- 3) Aplikasi yang dipakai di Pengadilan Negeri Bantul:
 - SIPP versi 3.2.0-5
 - MIS (Monitoring Implementasi SIPP) versi 1.2
 - PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) versi 1.2
 - Aplikasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMN (SAIBA, SIMAK-BMN, PERSEDIAAN, SIMAN, GPP, RKAKL-DIPA, SAS, SPAN, E-REKON, SMART
 - Aplikasi on-line : KOMDANAS, SIKEP, E-MONEV, DIPA-ONLINE, M-SPAN
 - Aplikasi pengembangan sendiri: e-employment (aplikasi kepegawaian), e-hukum, e-tilang, e-caseControl (aplikasi control perkara), e-survey (aplikasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP)
- 4) Dukungan internet dan website:
 - Internet Service Provider: Telkom Indihome dengan bandwidth up-to 100 Mbps
 - Web hosting: 20 GB
 - Jumlah server: 2 (Server Data dan Server Aplikasi)
 - Jaringan menggunakan Wifi dan Kabel. Terdapat 6 titik wifi dan hanya ada beberapa komputer yang menggunakan jaringan kabel LAN.

c. Pelaporan

Pelaporan terdiri atas pelaporan rutin yang menyajikan data pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu yang meliputi kompilasi data dari kepaniteraan maupun sekretariat.

- Laporan bulanan, yang merupakan laporan pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan dan kesekretariatan meliputi kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta kepegawaian, organisasi tata laksana, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan dalam jangka waktu satu bulan
- Laporan Tahunan, yaitu laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan kepaniteraan dan sekretariat dalam jangka waktu satu tahun, dan

paparan kebijakan serta analisa pengelolaan antara perkara, SDM, anggaran, sarana, serta dukungan Teknologi Informasi.

- SAKIP yang merupakan sistem untuk menilai akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bantul dengan membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama.

B. KEGIATAN ADMINISTRASI TEKNIS

Kegiatan pada bidang teknis meliputi kegiatan penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara Pidana dan Perkara Perdata, serta kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat baik berupa informasi hukum, legalisasi/pengesahan, surat keterangan tertentu, bantuan hukum, maupun pengaduan hukum.

1. Penyelesaian Perkara Bulan Desember 2018

a. Prosentase penyelesaian perkara pidana

Prosentase penyelesaian perkara pidana disajikan dengan memperbandingkan sisa perkara bulan yang lalu ditambah jumlah perkara yang masuk pada bulan ini dengan jumlah perkara yang minutasasi sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara pidana dalam satu periode bulanan.

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut:

- Penyelesaian perkara pidana biasa



- Penyelesaian perkara pidana Anak



- Penyelesaian perkara pidana singkat



- Penyelesaian perkara pidana cepat



- Penyelesaian perkara pidana lalu-lintas



- Penyelesaian perkara pidana pra-peradilan

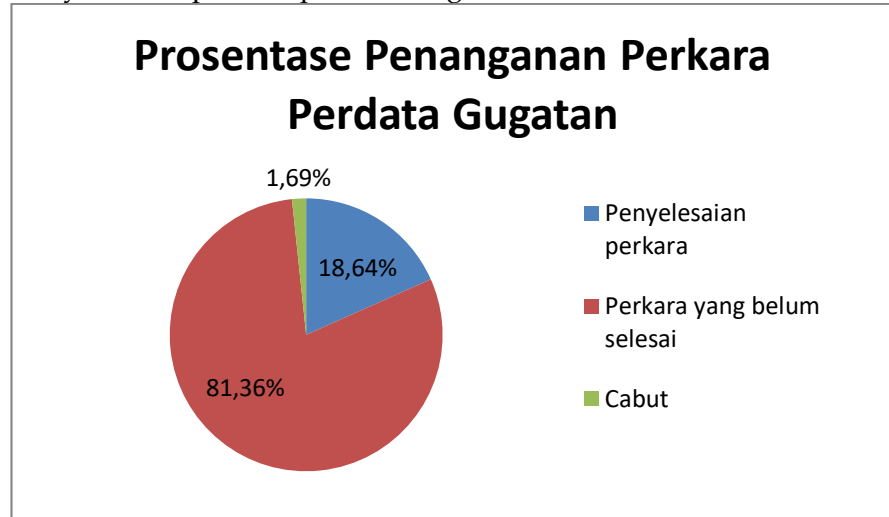


b. Prosentase penyelesaian perkara perdata

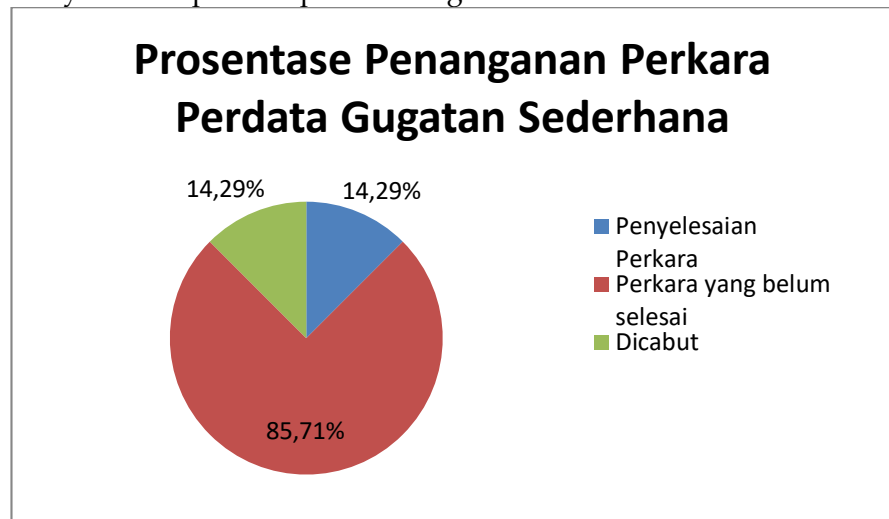
Prosentase penyelesaian perkara perdata disajikan dengan memperbandingkan sisa perkara bulan yang lalu ditambah jumlah perkara yang masuk pada bulan ini dengan jumlah perkara yang minutasasi sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara perdata dalam satu periode bulanan.

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut:

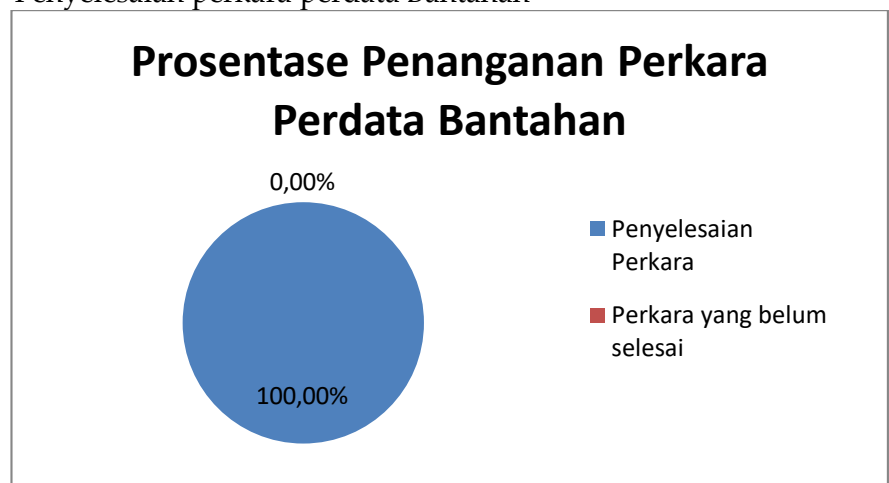
- Penyelesaian perkara perdata Gugatan



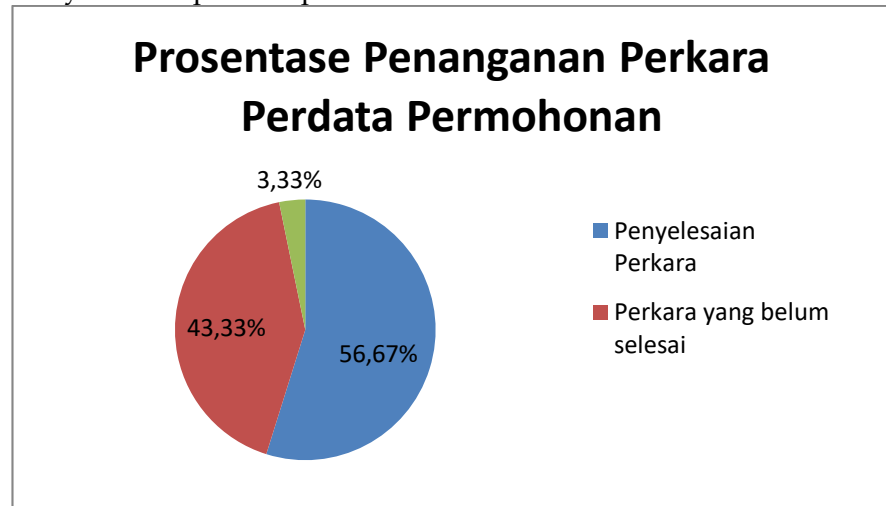
- Penyelesaian perkara perdata Gugatan Sederhana



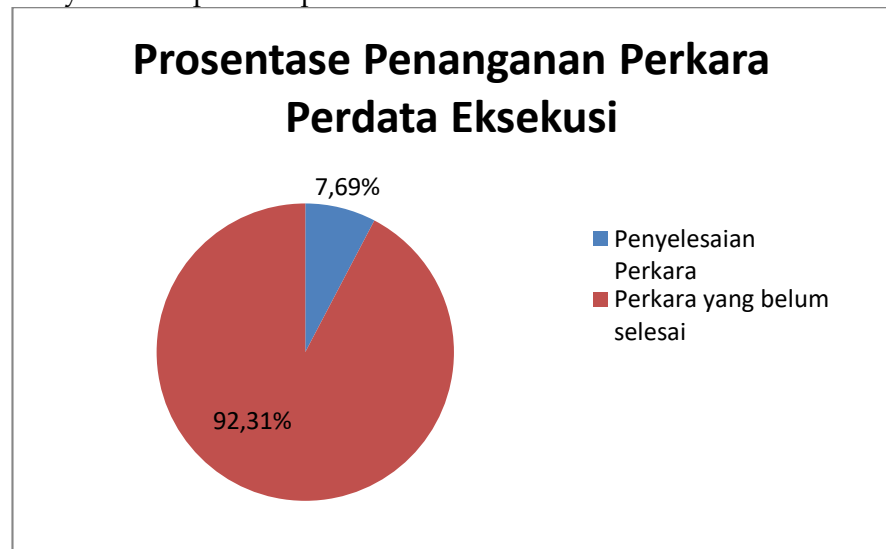
- Penyelesaian perkara perdata Bantahan



▪ Penyelesaian perkara perdata Permohonan



▪ Penyelesaian perkara perdata Eksekusi



2. Data Perkara bulan Desember 2018

a. Data perkara pidana

1) Perkara Pidana Biasa

a) Sisa perkara bulan lalu	:	51	Perkara
• Belum putus 41 perkara			
• Putus belum minutasi 10 perkara			
b) Masuk bulan ini	:	28	Perkara
c) Putus bulan ini	:	24	Perkara
d) Belum putus bulan ini	:	45	Perkara
e) Minutasi	:	24	Perkara
f) Putus belum minutasi	:	10	Perkara
g) Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
h) Sisa Bulan ini	:	55	Perkara

2) Perkara Pidana Anak

a) Sisa perkara bulan lalu	:	1	Perkara
• Belum putus 1 perkara			
• Putus belum minutasi 0 perkara			

b)	Masuk bulan ini	:	2	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	2	Perkara
d)	Belum putus	:	1	Perkara
e)	Minutasi	:	2	Perkara
f)	Putus belum Minutasi	:	0	Perkara
g)	Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
h)	Sisa bulan ini	:	1	Perkara
i)	Perkara yang diselesaikan secara diversi	:	0	Perkara
3)	Perkara Pidana Singkat			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	• Belum putus 0 perkara			
	• Putus belum minutasi 0 perkara			
b)	Masuk bulan ini	:	0	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	0	Perkara
d)	Minutasi	:	0	Perkara
e)	Putus belum minutasi	:	0	Perkara
f)	Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
g)	Sisa bulan ini	:	0	Perkara
4)	Perkara Pidana Cepat			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	22	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	22	Perkara
d)	Minutasi	:	22	Perkara
e)	Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
f)	Sisa bulan ini	:	0	Perkara
5)	Perkara Pidana Lalu Lintas			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	940	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	940	Perkara
d)	Sisa bulan ini	:	0	Perkara
6)	Putusan pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu (tidak terlambat)	:	48	Perkara
7)	Upaya Hukum Banding			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	1	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	3	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	0	Perkara
d)	Sisa bulan ini	:	4	Perkara
8)	Upaya Hukum Kasasi			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	10	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	0	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	2	Perkara
d)	Sisa bulan ini	:	8	Perkara
9)	Upaya Hukum Grasi			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	0	Perkara

	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
10)	Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
11)	Perkara Pra Peradilan			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	1	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	1	Perkara
	d) Minutasi	:	1	Perkara
	e) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
b. Data perkara perdata				
1)	Perkara Perdata Gugatan			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	49	Perkara
	• Belum putus 46 perkara			
	• Putus belum minutasi 3 perkara			
	b) Masuk bulan ini	:	10	Perkara
	c) Dicabut bulan ini	:	1	Perkara
	d) Putus bulan ini	:	10	Perkara
	e) Belum putus	:	45	Perkara
	f) Minutasi	:	11	Perkara
	g) Putus belum minutasi	:	3	Perkara
	h) Belum dibagi	:	0	Perkara
	i) Sisa bulan ini	:	48	Perkara
2)	Perkara Perdata Gugatan Sederhana			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	4	Perkara
	• Belum putus 3 perkara			
	• Putus belum minutasi 1 perkara			
	b) Masuk bulan ini	:	3	Perkara
	c) Putus	:	3	Perkara
	d) Dicabut bulan ini	:	1	Perkara
	e) Belum dibagi	:	0	Perkara
	f) Minutasi	:	1	Perkara
	g) Putus belum minutasi	:	3	Perkara
	h) Sisa bulan ini	:	6	Perkara
3)	Perkara Perdata Bantahan			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus	:	0	Perkara
	d) Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
	e) Belum dibagi	:	0	Perkara
	f) Minutasi	:	0	Perkara
	g) Sisa bulan ini	:	0	Perkara

4)	Perkara Perdata Permohonan			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	11	Perkara
	• Belum putus 9 perkara			
	• Putus belum minutasi 2 perkara			
b)	Masuk bulan ini	:	19	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	19	Perkara
d)	Dicabut bulan ini	:	1	Perkara
e)	Belum putus	:	9	Perkara
f)	Minutasi	:	17	Perkara
g)	Putus belum minutasi	:	4	Perkara
h)	Sisa Belum Dibagi	:	0	Perkara
i)	Sisa bulan ini	:	13	Perkara
5)	Keterlambatan penyampaian Putusan perdata kepada para pihak	:	0	Perkara
6)	Perkara Perdata Banding			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	9	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	2	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	5	Perkara
d)	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
e)	Belum putus	:	6	Perkara
7)	Perkara Perdata Kasasi			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	6	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	4	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	1	Perkara
d)	Dicabut/TMS bulan ini	:	1	Perkara
e)	Sisa bulan ini	:	8	Perkara
8)	Perkara Perdata Peninjauan Kembali			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	3	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	0	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	0	Perkara
d)	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
e)	Belum putus	:	3	Perkara
9)	Pengiriman Berkas Upaya hukum			
a)	Banding	:	0	Perkara
b)	Kasasi	:	0	Perkara
c)	Peninjauan Kembali	:	1	Perkara
10)	Penerimaan Kembali Berkas Upaya hukum			
a)	Banding	:	5	Perkara
b)	Kasasi	:	1	Perkara
c)	Peninjauan Kembali	:	0	Perkara
11)	Perkara Mediasi	:		
a)	Jumlah perkara yang di mediasi	:	3	Perkara
b)	Perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian	:	1	Perkara
12)	Perkara eksekusi			
a)	Sisa Perkara Bulan lalu	:	52	Perkara

b) Masuk Bulan ini	:	0	Perkara
c) Perkara ditidaklanjuti (eksekusi dilaksanakan)	:	1	Perkara
d) Dicabut	:	3	Perkara
e) Sisa bulan ini	:	48	Perkara

3. Pelayanan Hukum Bulan Desember 2018

a. Pelayanan akta badan hukum			
1) Jumlah pengesahan/pendirian	:	6	
2) Jumlah Perubahan anggaran dasar	:	4	
3) Jumlah Pembubaran/likuidasi	:	0	
b. Pelayanan posbakum			
1) Jumlah kunjungan posbakum	:	0	
2) Jumlah pelayanan posbakum	:	0	(penunjukan majelis hakim untuk pendampingan dalam perkara)
3) Jumlah petugas piket posbakum	:	7	Lembaga
c. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima	:	0	

4. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Berikut adalah status perkara yang tercatat pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) per 31 Desember 2018 di Pengadilan Negeri Bantul.

STATUS DARI PERKARA GUGATAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Kesepakatan Mediasi Gugatan	-	6	6
2	Perkara Yang Belum Putusan Gugatan	8	34	42
3	Perkara Yang Belum Minutasi Gugatan	1	6	7
4	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Permohonan Banding Gugatan	1	-	1
5	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas Banding Gugatan	-	2	2
6	Perkara Yang Belum Putusan Banding Gugatan	1	3	4
7	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Putusan Banding Gugatan	-	2	2
8	Perkara Yang Belum Penyerahan Memori Kasasi Gugatan	-	1	1
9	Perkara Yang Belum Putusan Kasasi Gugatan	3	5	8
10	Perkara Yang Belum Pemberitahuan Putus Kasasi Gugatan	1	-	1

STATUS DARI PERKARA PERMOHONAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Majelis Hakim/Hakim Permohonan	-	1	1

2	Perkara Yang Belum Putusan Permohonan	1	8	9
3	Perkara Yang Belum Minutasi Permohonan	1	3	4

STATUS DARI PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Kasasi Perlindungan/Bantahan (derden verzet)	1	1	2

STATUS DARI PERKARA GUGATAN SEDERHANA

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Gugatan Sederhana	-	3	3
2	Perkara Yang Belum Minutasi Gugatan Sederhana	1	1	2

STATUS DARI PERKARA PIDANA BIASA

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Biasa	1	49	50
2	Perkara Yang Belum Minutasi Pidana Biasa	1	3	4
3	Perkara Yang Belum Putusan Banding Pidana Biasa	-	3	3

STATUS DARI PERKARA PIDANA CEPAT

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Banding Pidana Cepat	-	1	1

STATUS DARI PERKARA PIDANA ANAK

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Anak	-	2	2

STATUS PENAHANAN

Jumlah Terdakwa Yang Masa Penahanannya Akan Habis Dalam Waktu Kurang Dari 7 Hari

No	Jenis Perkara	Jumlah
Tidak Ada Data		

Jumlah Terdakwa Yang Masa Penahanannya Telah Habis

No	Jenis Perkara	Jumlah
Tidak Ada Data		

STATUS JURNAL KEUANGAN PERDATA

Jumlah Sisa Panjar Perkara Yang Belum Dikembalikan

No	Jenis Perkara	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Tingkat PK
1	Gugatan	35	31	21	1
2	Permohonan	4	-	-	-
3	Perlindungan/Bantahan	-	2	-	-

	(derden verzet)				
4	Gugatan Sederhana	9	-	-	-

Jumlah Panjar Perkara Yang Hampir Habis (Kurang dari Rp. 100.000,-)

No	Jenis Perkara	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Tingkat PK
1	Gugatan	-	1	-	-

BAB III PROGRESS DAN PENCAPAIAN

Bagian ini menyampaikan beberapa pencapaian atau kegiatan yang dilakukan selama bulan Desember tahun 2018 pada masing masing bidang. Penyampaian progress perkembangan disajikan dengan membandingkan data pada tiga bulan terakhir. Beberapa progres yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul pada bulan ini adalah

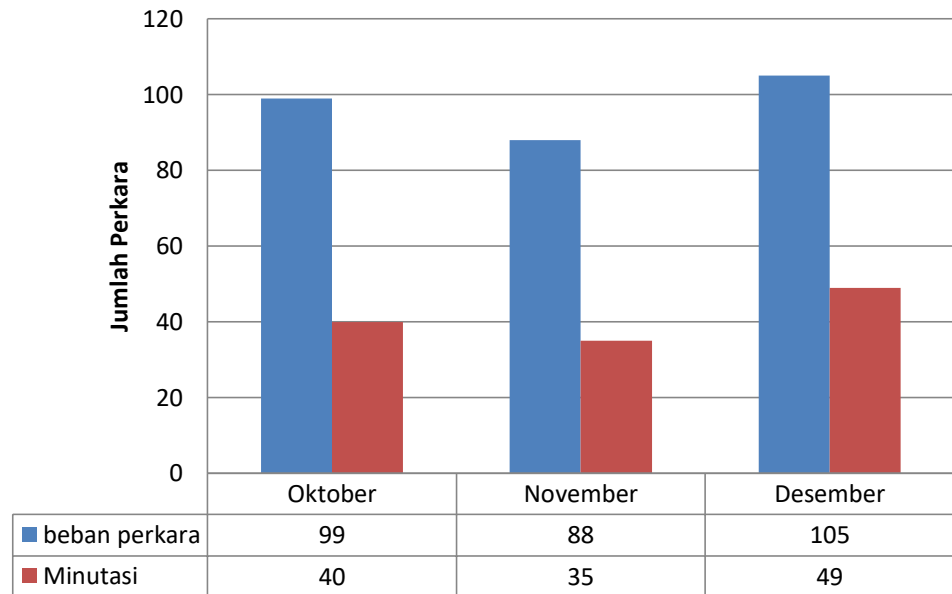
A. Progres Penyelesaian perkara 3 bulan terakhir

1. Penyelesaian perkara pidana

Bulan		Jenis Perkara					
		Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Singkat	Pidana Cepat	Pidana Lalu-Lintas	Pidana Pra Peradilan
Okt 2018	Sisa awal	51	4	2	0	0	0
	Masuk	33	0	0	8	1291	1
	Putus	16	2	0	8	1291	0
	Minutasi	27	3	2	8	-	0
	Putus Belum Minutasi	2	1	0	0	0	0
	Sisa Belum Putus	55	0	0	0	0	1
	Sisa Keseluruhan	57	1	0	0	0	1
Nov 2018	Sisa awal	57	1	0	0	0	1
	Masuk	25	1	0	2	6450	1
	Putus	39	0	0	2	6450	1
	Minutasi	31	1	0	2	-	1
	Putus Belum Minutasi	10	0	0	0	0	0
	Sisa Belum Putus	41	1	0	0	0	1
	Sisa Keseluruhan	51	1	0	0	0	1
Des 2018	Sisa awal	51	1	0	0	0	1
	Masuk	28	2	0	22	940	0
	Putus	24	2	0	22	940	1
	Minutasi	24	2	0	22	-	1
	Putus Belum Minutasi	10	0	0	0	0	0
	Sisa Belum Putus	45	1	0	0	0	0
	Sisa Keseluruhan	55	1	0	0	0	0

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara pidana terhadap beban perkara pidana

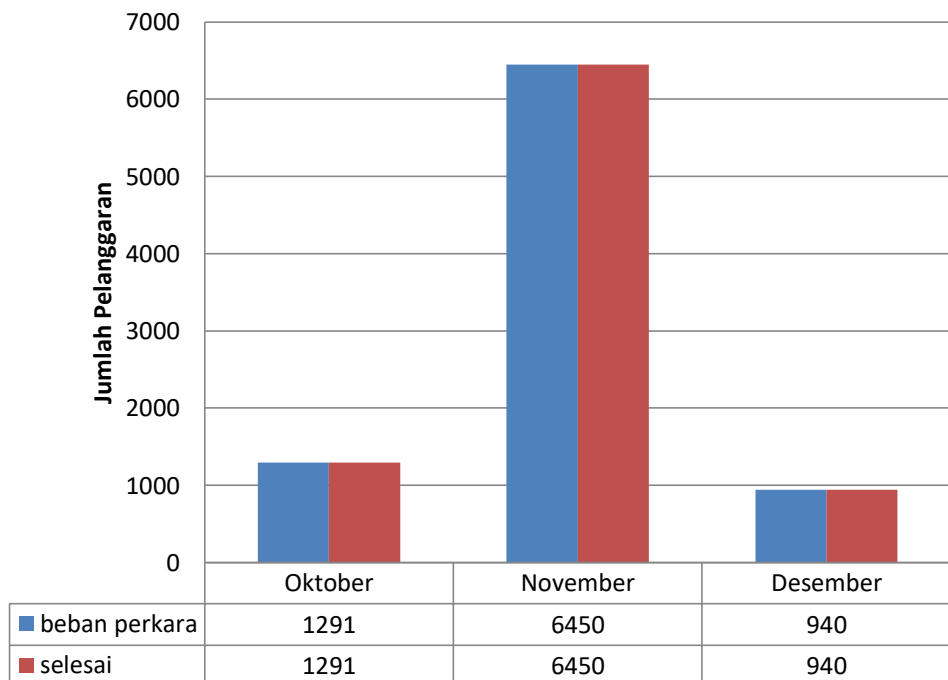
Rekapitulasi Rasio Penyelesaian Perkara Pidana 3 Bulan Terakhir



Catatan : perkara lalu lintas ada pada grafik tersendiri

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara pidana lalu-lintas terhadap beban perkara

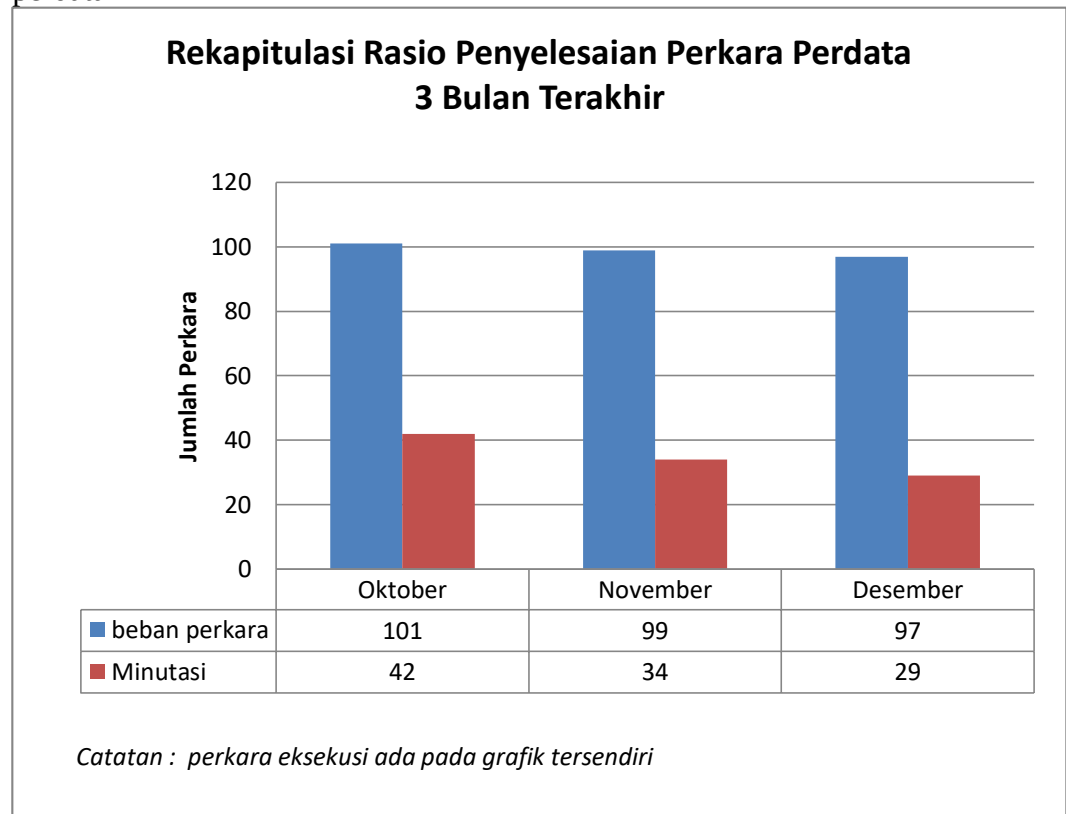
Rekapitulasi Rasio Penyelesaian Perkara Pidana Lalu-Lintas 3 Bulan Terakhir



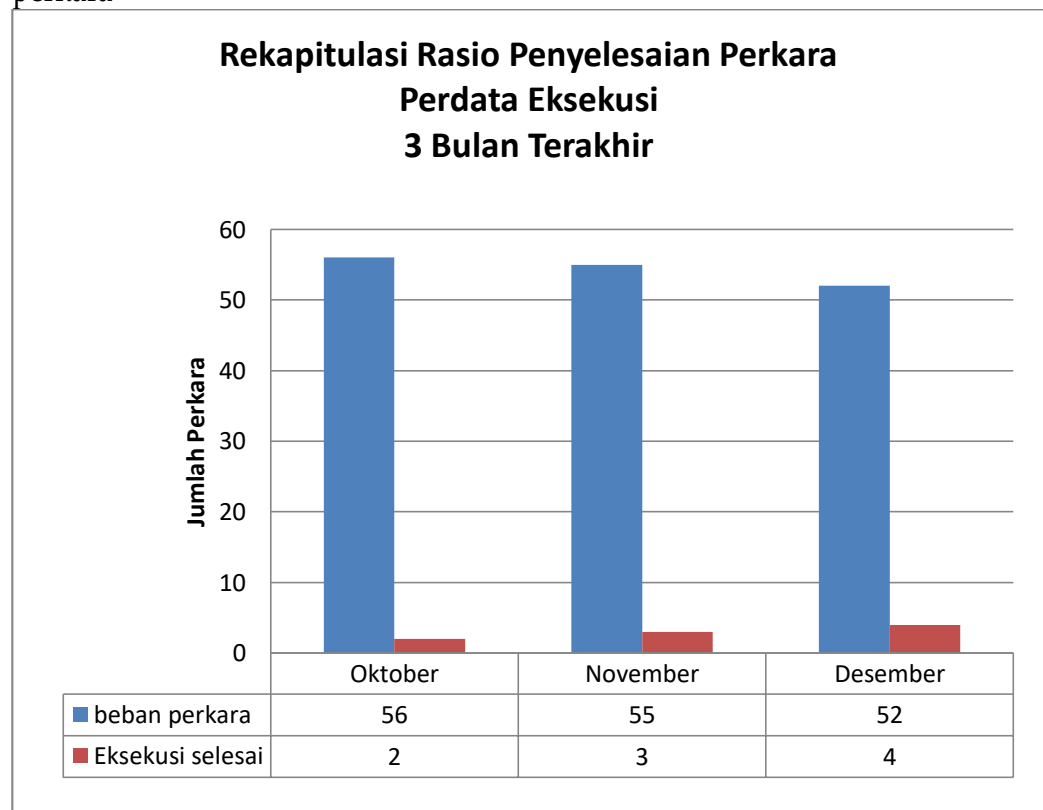
2. Penyelesaian perkara perdata

Bulan		Jenis Perkara				
		Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Perdata Bantahan	Perdata Permo- honan	Perdata Eksekusi
Okt 2018	Sisa awal	43	2	1	15	54
	Masuk	13	10	0	17	2
	Putus	7	6	1	20	2
	Minutasi	12	7	1	22	0
	Putus Belum Minutasi	2	0	0	1	0
	Sisa belum putus	42	5	0	9	54
	Sisa Keseluruhan	44	5	0	10	54
Nov 2018	Sisa awal	44	5	0	10	54
	Masuk	14	5	0	21	1
	Putus	10	7	0	16	3
	Minutasi	9	5	0	20	0
	Putus Belum Minutasi	3	1	0	2	0
	Sisa belum putus	46	3	0	9	52
	Sisa Keseluruhan	49	4	0	11	52
Des 2018	Sisa awal	49	4	0	11	52
	Masuk	10	3	0	19	0
	Putus	11	4	0	19	4
	Minutasi	11	1	0	17	0
	Putus Belum Minutasi	3	3	0	4	0
	Sisa belum putus	45	3	0	9	48
	Sisa Keseluruhan	48	6	0	13	48

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara perdata terhadap beban perkara perdata



Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara perdata eksekusi terhadap beban perkara



B. Pelayanan**1. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

- Kegiatan pelayanan Perdata, Pidana, dan pelayanan Hukum serta Penerimaan Surat melalui meja PTSP telah berjalan semakin baik. Masih perlu ditingkatkan.

2. Persidangan

- Pelayanan laporan sidang diterima di meja informasi atau di meja PTSP.

C. Sarana dan prasarana

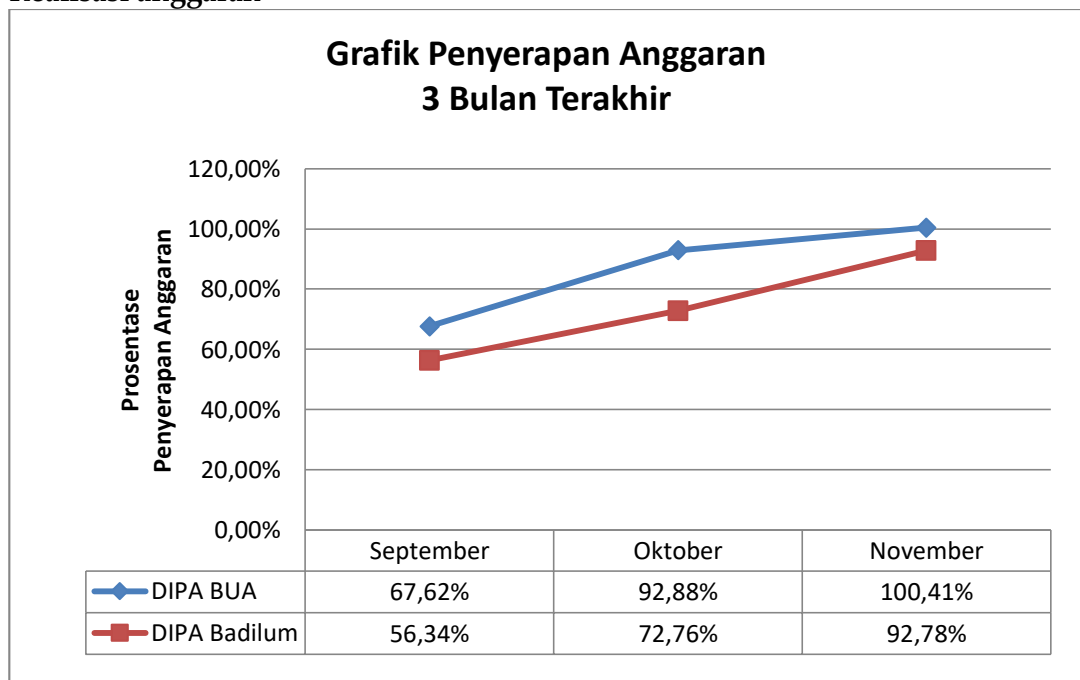
- Penyisiran terhadap atap/dak yang kemungkinan bocor/rembes dan dilakukan perencanaan untuk tindakan pencegahan sebelum hujan mulai turun.
- Perencanaan untuk perbaikan kamar mandi hakim dan panitera di lantai 2 karena ada kebocoran.

D. Kepegawaian dan Tata Laksana Organisasi

- Tata Laksana Organisasi sudah berjalan dengan baik.
- Rapat mingguan hakim, kepaniteraan, sekretariat berjalan secara rutin.

E. SIPP/MIS

Terdapat temuan pada SIPP pada bagian penahanan terdakwa. Belum adanya opsi lepas tahanan demi hukum. MIS sebagai salah satu acuan pimpinan dalam melakukan kontrol dan ditampilkan dalam rapat mingguan, untuk mengetahui progress kinerja.

F. Realisasi anggaran**G. Kegiatan perencanaan dan anggaran**

Dilakukan estimasi realisasi terhadap belanja gaji dan tunjangan pegawai hingga bulan Desember 2018. Terdapat indikasi pagu minus pada belanja tunjangan sehingga perlu mendapatkan tambahan.

Juga dilakukan pengiriman via e-mail scan pdf TOR dan RAB TA 2019 yang telah disesuaikan dengan adk yang baru ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk keperluan pembahasan pagu definitif oleh PT yogyakarta di tingkat pusat.

Bab IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan laporan kegiatan baik teknis maupun administrasi umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada umumnya semua pelaksanaan kegiatan ada Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan namun masih perlu peningkatan performa pada masing masing bidang.
- Dengan volume pekerjaan yang cukup banyak, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan personil tenaga untuk ditempatkan di bidang administrasi, baik administrasi di sekretariat maupun di kepaniteraan.

2. Saran

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi adalah:

- Untuk kesekretariatan dengan beban pekerjaan yang semakin berat belum diiringi adanya penambahan kualitas ataupun kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk membagi adil pekerjaan yang ada
- Di kepaniteraan juga mengalami hal yang sama yaitu kekurangan staf pelaksana, akan tetapi dapat diatasi dengan memperbantukan tenaga teknis Penitera Pengganti untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana disamping tugas fungsionalnya.
- Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan untuk masyarakat. Dengan menggunakan sarana yang ada diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan masyarakat merasa terlayani dengan puas oleh kualitas pelayanan pengadilan.

Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa saran yang dapat dilakukan adalah:

- Untuk mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia perlu dilakukan pembinaan baik secara internal maupun dorongan dari pengawas untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin serta dilakukan pelatihan untuk peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Untuk sarana yang terbatas, dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan/perawatan atas sarana tersebut untuk memperbaiki fungsi maupun estetika sehingga layak digunakan.

Bantul, 13 Desember 2018
Panitera,



Lestijono Warsito, S.H., M.H.
NIP. 196605221991031002

Sekretaris,



Wiratno, S.H.
NIP. 197202131993031002